Nomor : 2667/1/HK.00.03/7/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1. 2.	untuk penyelenggaraan program sekolah rakyat dan mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial; bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial diperlukan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Sosial;	Terdapat penambahan fungsi dan organisasi eselon III pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi terkait dengan penyelenggaraan sekolah rakyat	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 11; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas II Pasal. Pasal I mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial diubah sebagai berikut: 1. Penambahan Pasal 162A; 2. Perubahan Pasal 165; 3. Perubahan Pasal 166; 4. Perubahan Pasal 167; 5. Penambahan Pasal 168A; 6. Penambahan Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C 7. Perubahan Pasal 182; dan 8. Perubahan Lampiran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
			Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); dan 5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358).			Sementara Pasal II mengatur mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.

Sekretaris Jenderal,



Robben Rico

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN